

## **TJOE BOU SAN, NASIONALIS TIONGHOA DAN REDAKTUR SIN PO**

**Iwan Dwi Aprianto**

*iwandwiaprianto24@gmail.com*

### **Abstrak**

Tjoe Bou San adalah tokoh nasionalis Tionghoa di Hindia Belanda yang lahir di Batavia tahun 1891 dan meninggal di Batavia tanggal 3 November 1925. Ketika menjabat sebagai pemimpin dan direktur Sin Po, dia mengembangkan konsep nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda dan memimpin kampanye dalam memberantas kekawulaan Belanda ketika berlangsung Perang Dunia I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan Tjoe Bou San hingga bentuk perannya dalam perkembangan Sin Po. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah karena masalah yang diungkapkan lebih terfokus pada peristiwa masa lampau kehidupan seorang pemimpin nasionalisme Tionghoa bernama Tjoe Bou San yang lebih ditekankan pada perjuangannya melalui Koran Sin Po. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Tjoe Bou San merasa bahwa warga Tionghoa di Hindia Belanda (baik peranakan maupun totok) harus menganggap diri mereka Tionghoa. Pandangannya berseberangan dengan P.H. Fromberg Sr, Yap Hong Tjoen, dan Hauw Tek Kong. Mereka beranggapan jika *onderdaanschap* (kekawulaan) biasanya sama dengan *nationaliteit* (kewarganegaraan) dan hakikat dari kewarganegaraan adalah kepentingan bersama. Selain dikenal sebagai seorang wartawan dan pemimpin pergerakan nasionalisme Tionghoa, dia juga merupakan salah seorang penulis novel. Salah satu novel terbaiknya adalah *The Loan Eng* yang terbit pada 1922.

**Kata kunci:** *Tjoe Bou San, nasionalis Tionghoa, Tiongkok, kawula, Sin Po.*

## ***TJOE BOU SAN, CHINA NATIONALIST AND EDITOR SIN PO***

### **Abstract**

*Tjoe Bou San is a Chinese nationalist figure in the Dutch East Indies who was born in Batavia in 1891 and died in Batavia on 3 November 1925. While serving as leader and director of Sin Po, he developed the concept of Chinese nationalism in the Dutch East Indies and led a campaign to eradicate Dutch colonialism when World War I. This study aims to determine the background of the life of Tjoe Bou San and the scope of his role in the development of Sin Po. This research is a historical research because the problems expressed are more focused on the past events of the life of a leader of Chinese nationalism named Tjoe Bou San who emphasizes more on his struggle through the Sin Po newspaper. Based on the study conducted, it can be seen that Tjoe Bou San felt that Chinese citizens in the Dutch East Indies (both crossbreed and full-blooded) should consider themselves Chinese. His view was contrary to P.H. Fromberg Sr, Yap Hong Tjoen, and Hauw Tek Kong. Apart from being known as a journalist and leader of the Chinese nationalism movement, he is also a novelist. One of his best novels is *The Loan Eng*, published in 1922.*

**Keywords:** *Tjoe Bou San, Chinese nationalist, Chinese, kawula, Sin Po.*

Naskah masuk: 18-4-2022; Revisi akhir: 26-11-2022; Disetujui terbit: 23-12-2022

## I. PENDAHULUAN

Salah satu keberagaman suku yang ada di Indonesia adalah keberadaan etnis Tionghoa yang sudah berabad-abad menjadi bagian dari bangsa ini. Sayangnya, Tionghoa sering kali dianggap sebagai kelompok yang apolitik dan asosial. Peranan orang Tionghoa dalam penulisan sejarah Indonesia pada berbagai hal hampir tidak pernah disebutkan secara panjang, meskipun banyak bukti sejarah yang menunjukkan sumbangan etnis Tionghoa bagi perkembangan Indonesia, misalnya dalam bidang agama, kesusastraan, bahasa, kesenian, olah raga, bangunan, teknologi makanan, dan kedokteran (Kurniawan, 2014: 19).

Gambaran umum mengenai etnis Tionghoa di Indonesia yang ada selama ini adalah stigma bahwa mereka merupakan *economic animal* (“binatang ekonomi”) yang bersifat oportunistik, tidak memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalaupun etnis Tionghoa disinggung dalam penulisan sejarah biasanya banyak berkaitan dengan peranannya di bidang ekonomi sebagai penguasa jalur ekonomi atau perantara yang banyak merugikan masyarakat pribumi dari kota sampai pelosok desa (Hanggara, 2016: 56–57).

Menjelang abad ke-20 timbul peralihan dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Hindia Belanda, yaitu perubahan ekonomi dan perluasan birokrasi sistem kemasyarakatan yang mengakibatkan munculnya tuntutan bagi para tenaga kerja terampil. Politik etnis kemudian muncul dengan maksud merombak pendidikan masyarakat pribumi. Beberapa penduduk Tionghoa di sisi lain membentuk organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada 17 Maret 1900 di Batavia. Menurut Hapsari (2016: 257), THHK bisa disebut sebagai organisasi pergerakan pertama Tionghoa di Hindia Belanda. Organisasi ini awalnya hanya berkecimpung di bidang kebudayaan, tetapi lantas masuk kebidang politik dan pendidikan. THHK di kemudian hari menjadi pencetus sekolah bermutu bagi penduduk Tionghoa.

Menghadapi tantangan seperti itu, pemerintah Belanda kemudian mendirikan *Hollands Chineesche Scholen* (HCS) pada 1908, yaitu sekolah dasar gaya baru yang dikhususkan untuk anak-anak Tionghoa dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendirian sekolah ini merupakan bagian dari politik kolonial yang senantiasa melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Hindia Belanda (Suryadinata, 1988: 21).

Pemerintah Belanda menjadikan HCS sebagai alat politik bagi warga Tionghoa supaya loyal terhadap pemerintah. Selain itu, sekolah tersebut juga menjadi usaha untuk menciptakan iklim pendidikan yang sesuai dengan kebijakan politik kolonial. Sebelum didirikan HCS, anak-anak Tionghoa yang mendapatkan pendidikan Belanda hanya sedikit, tetapi dengan adanya HCS mereka akan memilih pendidikan berbahasa Belanda dibandingkan THHK yang menggunakan pendidikan bahasa Tionghoa. Hal tersebut disebabkan prospek pekerjaan lulusan THHK sangat terbatas dan bahasa Tionghoa tidak digunakan dalam birokrasi dinas pemerintahan Hindia Belanda (Rohmah, 2014: 394).

Tabel 1. Jumlah Murid-Murid THHK di Batavia (Pahoa) tahun 1901–1941

Tahun	Jumlah
1901	31
1911	557
1933	1.040
1937	1.062
1938	1.198
1941	1.151

Sumber: Anonim, *Buku Peringatan 110 Tahun Sekolah THHK Pahoa Jakarta, Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup, 2011, hlm. 14–17*

Tabel 2. Jumlah dan Gaji Guru THHK di Batavia tahun 1936–1942

Tahun	Jumlah Guru	Gaji Rata-Rata (f)
1936	46	164.88
1937	37	134.98
1938	37	127.93
1939	68	118.00
1940	40	113.50
1941	38	116.00
1941	20	90.00

Sumber: Anonim, *Hari Ulang Tahun ke-50 THHK Djakarta 1900–1950, Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup, 1950, hlm. 43*

Benih-benih kebangsaan dan nasionalisme Tionghoa lantas tumbuh akibat adanya reformasi pendidikan. Para cendekiawan Tionghoa yang muncul melalui proses ini menyadari jika identitas baru akan didapatkan melalui ilmu pengetahuan, berita-berita internasional, serta kontak dengan berbagai orang. Perubahan yang didorong melalui pengaruh pendidikan telah memunculkan keberanian penduduk Tionghoa untuk menyuarakan aspirasinya. Sasaran utama mereka awalnya adalah supremasi dan tekanan dari bangsa Barat. Mereka menginginkan agar derajat penduduk Tionghoa sejajar dengan bangsa Barat dan bangsawan pribumi. Seiring dengan perubahan waktu, etnis minoritas ini semakin dalam memasuki aktivitas politik di Hindia Belanda.

Selain THHK, surat kabar peranakan Tionghoa bernama Sin Po turut mendukung nasionalisme politik Tionghoa. Mereka mendesak agar masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda terlibat dalam politik di Tiongkok dan meninggalkan kekawulaan Belanda, serta menarik diri dari institusi-institusi politik lokal. Kalangan nasionalis Sin Po tidak ingin bekerja sama dengan Belanda. Mereka menginginkan kesetaraan dengan Belanda di depan hukum dan menuntut pendidikan bagi kaum Tionghoa di Hindia Belanda (Suryadinata, 2005: 5).

Ketika Dinasti Manchu di Tiongkok runtuh, orang-orang Tionghoa mulai berani mengatakan kepada kaum pribumi bahwa republik yang baru akan segera mengusir Belanda dan orang Tionghoa akan menjadi penguasa dan tuan bagi mereka. Mereka menuntut kaum

pribumi untuk menyebut mereka “toean” dan memberi hormat, sama seperti yang dilakukan kaum pribumi terhadap priayi dan orang Belanda (Shiraishi, 2005: 49).

Seiring berjalannya waktu, perdebatan mengenai kebijakan kekawulaan maupun sekolah-sekolah untuk anak Tionghoa semakin memuncak. Banyak orang-orang Tionghoa peranakan mempermasalahkan hal tersebut dan melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda, salah satunya adalah Tjoe Bou San. Dia adalah seorang tokoh peranakan Tionghoa yang menjadi redaktur Sin Po pada kurun waktu 1919–1925 dan menjadi pelopor nasionalisme Tionghoa yang cukup berpengaruh di Hindia Belanda. Ketika menjadi pemimpin redaksi dan direktur Sin Po, dia memimpin kampanye dalam memberantas kekawulaan Belanda ketika berlangsung Perang Dunia I. Dia menganggap jika masyarakat Tionghoa peranakan dan totok harus memiliki nasionalisme Tionghoa.

Tjoe banyak menulis kritik-kritikannya melalui surat kabar Sin Po. Tulisan-tulisan maupun kritiknya terkenal tajam, sehingga sering menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Pandangannya terkait nasionalisme Tionghoa berseberangan dengan beberapa tokoh, yaitu P.H. Fromberg Sr, Yap Hong Tjoen, dan Hauw Tek Kong. Tjoe merupakan jurnalis yang berpendirian kuat, sehingga dijuluki kepala batu oleh Kwee Hing Tjiat. Selain dikenal sebagai wartawan dan pemimpin pergerakan nasionalisme Tionghoa, dia juga merupakan seorang penulis novel. Salah satu novel terbaiknya adalah *The Loan Eng* yang terbit pada 1922.

Beberapa inovasi yang dilakukannya ketika memimpin Sin Po adalah menerbitkan Sin Po Chineesche Editie (edisi bahasa Tionghoa), Bin Seng (versi lebih murah dari harian Sin Po), Sin Po Oost-Java Editie (edisi Jawa Timur di Surabaya), dan Sin Po Wekelijksche Editie (edisi mingguan). Ketika kesehatannya semakin menurun, dia jarang menulis mengenai hal-hal berbau politik, tetapi lebih banyak membaca buku-buku filsafat dan menerjemahkan buku-buku Tiongkok klasik. Suryadinata (2010:15) menyebut bahwa Tjoe juga mempelajari *Zhuangzi* (*Chuang Tzu*) dan *Daodejing* (*Tao Te Ching*). Menjelang akhir kehidupannya, pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Lao Zi (Lao Tzu) yang menganjurkan *wu wei* atau *boet wi* (tidak berbuat apa-apa).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu 1) Bagaimana latar belakang kehidupan Tjoe Bou San?; 2) Bagaimana bentuk kritik dan pemikiran Tjoe Bou San terhadap kebijakan pemerintah Belanda, khususnya mengenai masalah *kekawulaan*?; 3) Bagaimanakah perkembangan Sin Po ketika berada di bawah kepemimpinan Tjoe Bou San?; 4) Apa sajakah karya sastra yang dihasilkan oleh Tjoe Bou San?

Terkait pustaka, buku karya Suryadinata (2010) berjudul *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien* menjadi rujukan penting dikarenakan membicarakan tentang tokoh-tokoh etnis Tionghoa dan aktivitas mereka dalam mendirikan organisasi sebagai upaya dalam mencari identitas nasionalnya. Hal lain yang dibahas dalam buku ini adalah perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dalam melawan rezim yang berkuasa dan hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

Buku selanjutnya adalah karya Lohanda (2001) berjudul *The Kapitan Cina of Batavia 1837–1942* yang mengulas tentang awal mula kedatangan bangsa Tionghoa ke Nusantara serta memberikan pembahasan mengenai organisasi etnis Tionghoa pada masa kolonial, terutama THHK yang telah memasuki arena politik. Organisasi ini banyak mendapat dukungan dari etnis Tionghoa peranakan yang tinggal di Hindia Belanda. Terakhir, adalah buku karya Wibowo (2000) yang berjudul *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis China di Indonesia* yang memuat berbagai karangan dari beberapa penulis seputar permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia. Buku ini banyak mengulas permasalahan etnis Tionghoa pada Orde Baru ketika represitas terhadap mereka sangat besar dirasakan. Diskriminasi Orde Baru dipaparkan dengan jelas melalui berbagai kesaksian penulis sendiri maupun kasus-kasus yang menimpa Orde Baru.

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis, yaitu heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. Adapun teknik yang digunakan sebagai analisis data adalah teknik analisa kualitatif, yaitu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat dari fenomena historis pada cakupan waktu dan tempat. Penelitian ini juga menggunakan istilah kata “Tionghoa” untuk menyebut warga negara Indonesia keturunan Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan arti negatif yang ditimbulkan saat etnis lain menyebut kata “Cina” dengan cara mengumpat atau saat marah. Selain itu, adanya Surat Edaran Presidium Kabinet No. Se. 06/Pres.Kab/6/1967 tentang sebutan Cina oleh Presiden Soeharto semakin memperburuk permasalahan, tetapi kata “Cina” tetap akan dipakai apabila merupakan sebuah kutipan dari buku atau data.

## II. PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang



Gambar 1. Tjoe Bou San

Sumber: Sin Po, “Toe an Tjoe Bou San Meninggal”, tanggal 3 November 1925

Tjoe Bou San (朱茂山) memiliki nama pena Oen Tjip Tiong dan Hauw San Liang, serta nama samaran San Ling Hauw dan Getoel Gaet. Dia lahir tahun 1891 di Batavia dan meninggal tanggal 3 November 1925 di Batavia (Setyautama, 2008: 460). Menurut Tio Le Soei (wartawan dan sastrawan Melayu-Tionghoa angkatan lama) dalam karya Claudine Salmon (peneliti kajian kesusastraan Melayu-Tionghoa berkebangsaan Prancis) (1981: 360) berjudul *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia*, dia lahir tahun 1892, tetapi Leo Suryadinata (sinolog kelahiran Jakarta yang berkewarganegaraan Singapura) (2010: 1) yang mengutip berita Sin Po tanggal 3 November 1925 berjudul *Toean Tjoe Bou San Meninggal*, meyakini bahwa Tjoe lebih tepat lahir tahun 1891 karena dia meninggal tahun 1925 ketika berusia 34 tahun. Dia adalah anak dari Tjoe Hoat Hin, seorang pedagang tekstil pasar gelap di Batavia (Salmon, 1981: 360–361; Setiono, 2008: 446). Tjoe memiliki dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Sumber-sumber primer serta penelitian yang dilakukan oleh Suryadinata (2010: 1) tidak menyebutkan secara jelas mengenai nama-nama dari saudara-saudaranya itu.

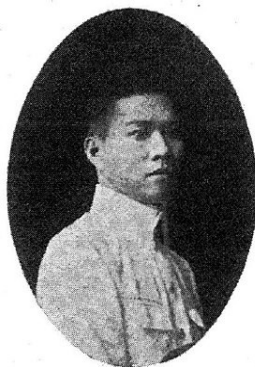
Tidak banyak keterangan mengenai pendidikannya. Menurut Salmon (1981: 360–361), Tjoe kemungkinan pernah masuk sekolah swasta Belanda dan Hokkien selama beberapa tahun untuk belajar bahasa Belanda, Inggris, dan Melayu. Suryadinata (2010: 1) menengarai bahwa Tjoe yang pasti dapat berbahasa Melayu-Betawi, sedangkan penguasaan bahasa Tionghoa, Belanda, dan Inggrisnya agak terbatas. Ang Jan Goan dalam Sin Po Wekelijksche Editie (edisi mingguan) tanggal 26 Desember 1925 berjudul *Almarhoem Tjoe Bou San* menulis bahwa Tjoe dapat membaca bahasa Tionghoa, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penguasaan lisan bahasa Tionghoanya. Menurut sumber lain, yaitu *Djawa Tengah Review* yang terbit di Semarang bulan September 1935 dan disiarkan kembali dalam Sin Po Jubelium Nummer 1910–1935, pengetahuan bahasa Tionghoanya (terutama klasik) sangat terbatas (Leo, 2012: 1194; Suryadinata, 2010: 1).

## **B. Karier**

Salmon (1981: 360) mengatakan bahwa Tjoe memulai menulis untuk surat kabar Hoa Pit dan Perniagaan, tetapi tidak menyebutkan periodenya secara jelas. Ketika berusia 18 tahun, Tjoe menjadi pemimpin redaksi majalah mingguan berkala resmi terbitan *Soe Po Sia* (Taman Bacaan) (Lee, 1987: 114) – organisasi tokoh berhaluan nasionalisme Tionghoa di Batavia yang mendukung revolusi Sun Yat Sen, yaitu Hoa Tok Po edisi Melayu (Lee, 2013: 175; Setyautama, 2008: 460; Wibowo dan Lan, 2010: 53). Suryadinata (2010: 1) meragukan penyebab Tjoe tidak dijadikan sebagai editor dari majalah Hoa Tok Po edisi Tionghoa yang dikuasai tokoh, yaitu kemungkinan karena dia adalah seorang peranakan atau kurang mahir menguasai bahasa Tionghoa.

Lebih lanjut, Suryadinata (2010: 2) meragukan mengenai masa jabatan Tjoe sebagai pemimpin majalah tersebut karena dia kemudian pindah ke Surabaya dan memimpin surat kabar Tjhoen Tjhioe (Musim Semi dan Musim Gugur) sejak Februari–Juni 1917. Sebelumnya, dia juga pernah menerbitkan mingguan Penghibur yang dicetak oleh percetakan Kho Tjeng

Bie bersama Lauw Giok Lan (Liu Njuk Lan), Lie On Moy, Lie In Eng, dan Song Chong Soei pada 1913, tetapi hanya bertahan dalam waktu singkat (Setiono, 2008: 445). Setyautama (penulis buku *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia*) (2008: 460) menyebutkan bahwa Tjoe lantas pindah lagi ke Batavia pada pertengahan tahun 1917 setelah meninggalkan harian Tjhoen Tjhioe dan berkunjung ke tanah leluhurnya, serta bekerja sebagai koresponden harian Sin Po edisi Melayu yang dipimpin oleh Kwee Hing Tjiat.



Tocan Tjoe Bou San almarhoem  
Directeur-hoofdredacteur „Sin Po”  
1918-1925.

編總文巫兼理總前報新  
民)像遺生先山茂朱輯  
(年四十國民至年七國

Gambar 2. Potret Tjoe Bou San saat menjadi pemimpin redaksi dan direktur Sin Po  
Sumber: Sin Po *Wekelijksche Editie*, “Almarhoem Tjoe Bou San”, tanggal 26 Desember 1925

Setahun kemudian, dia kembali lagi ke Batavia dan diangkat menjadi pemimpin redaksi tersebut untuk menggantikan Tjiat yang pergi ke Eropa (Setyautama, 2008: 460). Benny Gatot Setiono (peraih Weirtheim Award tahun 2008) (2008: 446) menambahkan bahwa Tjoe selanjutnya membeli saham Hauw Tek Kong pada 1919 dan menjadikan dirinya pemimpin redaksi yang merangkap jabatan sebagai direktur Sin Po. Koran itu lantas menjadi pelopor nasionalisme Tionghoa yang cukup berpengaruh di Hindia Belanda. Dia sendirilah yang mengembangkan konsep nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda dan memimpin kampanye dalam memberantas *kekawulaan* Belanda ketika berlangsung Perang Dunia I (Suryadinata, 2010: 2).

### C. Nasionalis Tionghoa

Nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda bermula pada 17 Maret 1900 dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) atau dikenal juga sebagai sekolah Pa Hoa, yaitu Rumah Perkumpulan Tionghoa di Patekoan, Batavia (Kurniawan, 2014: 22; Lan, 1940: 3–8; Leo, 2010: 23). Organisasi ini didirikan oleh Phoa Keng Hek, Lie Kim Hok, dan Lie Hin Liam dengan tujuan awal memperbaiki kebiasaan orang Tionghoa setempat berdasarkan Konfusianisme (Suryadinata, 2010: 41–42). Organisasi tersebut kemudian menjadi perkumpulan khusus yang memajukan pendidikan Tionghoa dan berhasil mendirikan cabang di

beberapa daerah (Hapsari, 2016: 257). Menurut pendapat dari para pemimpin THHK, orang Tionghoa dapat benar-benar mengerti ajaran Kong Hu Cu hanya dengan mempelajari bahasa Tionghoa (Lan, 1940: 3–8; Suryadinata, 2012: 30; Wibowo dan Lan, 2010: 80). THHK juga dikenal sebagai organisasi yang memprakarsai istilah “Tionghoa” secara luas, serta penggalang persatuan Tionghoa *Hoa Kiao* (perantauan), baik peranakan maupun totok (Kurniawan, 2014: 22; Suryadinata, 2010: 64).

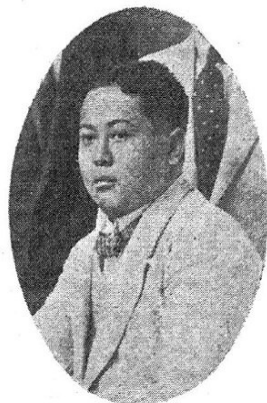


Gambar 3. Tiong Hoa Hwee Koan (THHK)

Sumber: *Riwayat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwee Koan–Batavia (1900–1939)*

Nasionalisme Tionghoa waktu itu merupakan nasionalisme kultural dan tujuannya lebih condong ke kebudayaan, bukan politik. Namun, dengan masuknya pengaruh totok yang menjadi simpatisan gerakan revolusioner di daratan Tiongkok, lambat laun pergerakan Tionghoa di Jawa juga bercorak politik (Suryadinata, 2010: 3). Organisasi politik Tiongkok seperti Tongmenghui (yang kemudian menjadi Kuomintang) mulai masuk ke Hindia Belanda sekitar tahun 1907 (Dahana, 2000: 70). *Soe Po Sia* yang menyebar ide revolusi juga dibentuk di kota-kota besar Hindia Belanda (Lee, 1987: 108–124). Arus nasionalisme politik ini semakin besar setelah Dinasti Qing atau Dinasti Manchu digulingkan dan Republik Tiongkok berdiri pada 1 Januari 1912 (Berg, 1954: 153).

*Sin Po* yang awalnya terbit secara *weekblad* (mingguan) lantas berubah frekuensinya menjadi harian tidak lama sesudah lahirnya Republik Tiongkok, yaitu sejak 1 April 1912 (Suryadinata, 2010: 3). Surat kabar itu menjadi lawan utama dari koran besar berpendirian konservatisme yang dipimpin oleh Gouw Peng Liang dan opsir-opsir peranakan Tionghoa (juga dikenal sebagai Kapitan China), yaitu *Kabar Perniagaan* (Setyautama, 2008: 460). Kapital *Sin Po* yang sebelumnya 100.000 *gulden* turut ditingkatkan menjadi 300.000 *gulden*. Penambahan tersebut menjadikan redaksi itu menjadi media peranakan Tionghoa dengan kapital terbesar di Hindia Belanda. Ketika berada di bawah pimpinan Tjiat (1916–1918), harian ini mulai bergerak memimpin masyarakat Tionghoa dalam hal-hal politik, misalnya menolak rencana Belanda yang ingin menjalankan *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada 1917. Lembaga tersebut ingin mengikutsertakan peranakan Tionghoa dan pribumi di dalamnya (Suryadinata, 2010: 3).



Toean Kwee Hing Tjiat, „Sin Po”  
poenja hoofdredacteur Tionghoa  
jang pertama.

任二第報新生先節恆郭  
輯編總文巫

Gambar 4. Kwee Hing Tjiat  
Sumber: Sin Po Jubileum Nummer 1910–1935

Rohmadi dan Wartyo (2019: 166–168) mencatat bahwa lembaga ini disetujui pada 16 Desember 1916, dijalankan pada 1 Agustus 1917, dan diresmikan pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda yang bernama Thomas Bastiaan Pleyte. Kahin (2018: 39–40) turut memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebut bahwa Limburg membentuk dan melantik *Volksraad* sesuai dengan konstitusi dalam *Indische Staatsrgeling* pada 18 Mei 1918. Pembentukan lembaga itu diatur dalam pasal 53–80 bagian kedua *wet op de Staatsinrichting Van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling)* yang ditetapkan pada 16 Desember 1916, serta diumumkan dalam *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* No. 114 Tahun 1917 dan berlaku pada 1 Agustus 1917. *Staatsblad* tersebut menjelaskan mengenai peraturan dan kekuasaan legislatif *Volksraad* di Hindia Belanda.

Pada 1917 pula diadakan sebuah konferensi penduduk Tionghoa untuk membicarakan masalah pembentukan lembaga tersebut di Semarang (Suryadinata, 1986: 26–32). *Sin Po* yang disokong oleh berbagai organisasi peranakan menolak usul dari Hok Hoei Kan (Kan Hok Hoei Sia), seorang peranakan yang pro Belanda, untuk ikut serta dalam politik lokal dengan alasan bahwa orang Tionghoa adalah warga negara Tiongkok (Kurniawan, 2014: 23). Penolakan itu ada hubungannya dengan rencana pemerintah Belanda mengadakan *Hindie Weerbaar* (pertahanan Hindia Belanda) yang mewajibkan kawula Belanda menjadi milisi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab warga peranakan Tionghoa tidak mau dianggap sebagai kawula. Selain itu, rencana tersebut juga ditentang oleh Sarekat Islam dan juga kelompok nasionalis Indonesia lainnya (Kahin, 2018:73; Salmon, 1981: 358).

Setelah menjadi pemimpin dan direktur Sin Po, Tjoe meneruskan pandangan tersebut dan mengembangkannya (Lee, 1987: 123; Suryadinata, 1996: 14–15). Sin Po tanggal 2 September 1918 menyebutkan bahwa dalam kata sambutannya ketika mengambil alih kedudukan Tjiat, Tjoe menulis sebagai berikut.

*Cuma satu perkara yang bikin saya punya hati sedikit ringan. Saya punya haluan kurang lebih ada persamaan dengan Tuan Kwee Hing Tjiat. Lantaran itu adalah satu hal yang saya berani janjikan pada penduduk Tionghoa di Hindia Belanda (Suryadinata, 1990: 4).*

Pada 1918, Tjoe mulai menggerakkan orang Tionghoa di Hindia Belanda untuk memberantas Undang-Undang Kekawulaan Belanda (Leo, 2010: 30). Perlu diketahui bahwa Dinasti Manchu sudah mengumumkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kerajaan pada 1909 sebelum terjadi Revolusi Xinhai atau Revolusi 1911, yang menegaskan bahwa semua orang yang berdarah Tionghoa dianggap berkewarganegaraan Tiongkok. Setahun kemudian, pemerintah Belanda juga mengumumkan bahwa penduduk yang lahir di Hindia Belanda adalah *Nederlands Onderdanen* (kawula Belanda) – peranakan Tionghoa otomatis menjadi kawula (Suryadinata, 1984: 47).

Setelah Republik Tiongkok berdiri, pemerintah Tiongkok yang baru melanjutkan konsep kewarganegaraan Dinasti Manchu. Republik Tiongkok menganggap semua orang Tionghoa (baik peranakan maupun totok) sebagai warga negaranya, tetapi Tiongkok dipaksa mengakui yurisdiksi Belanda. Selama orang Tionghoa itu bermukim di daerah kekuasaan Belanda, Undang-Undang Belanda yang berlaku (Xuanyi, 2019: 197). Hal ini ditegaskan dalam perjanjian konsuler antara Tiongkok dan Belanda (Suryadinata, 1986: 41–42). Oleh karena itu, orang totok tetap menjadi warga negara Tiongkok, sedangkan peranakan Tionghoa dalam praktiknya memiliki “kewarganegaraan rangkap” (kawula Belanda dan warga negara Tiongkok) (Suryadinata, 1984: 47; Suryadinata, 1990: 4).

Menurut Suryadinata (1986: 44), Sin Po berhasil mengumpulkan 28.789 tanda tangan dalam kampanye memberantas Undang-Undang Kekawulaan. Tek Kong, mantan direktur Sin Po, kemudian ditugaskan ke Tiongkok untuk menyampaikan tanda tangan itu dan meminta pemerintah di Peking (sekarang Beijing) menyokong petisi peranakan Tionghoa, yaitu mendesak Belanda supaya memberikan hak repudiasi (hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain) kepada peranakan. Namun, kampanye itu tidak berhasil karena Tiongkok tetap menandatangani perjanjian konsuler yang mengakui hak yurisdiksi pemerintah Belanda terhadap peranakan. Selain itu, kampanye yang dilakukan oleh Tjoe juga kehilangan momentumnya karena pemerintah Belanda sendiri tidak memaksakan usul pertahanan Hindia Belanda itu (Suryadinata, 2010: 5).

Setiono (2008:480) berpendapat bahwa kontroversi masalah tersebut akhirnya berhenti karena pemerintah Belanda membatalkan wajib militer bagi kawula dengan pertimbangan mempersenjatai orang-orang yang memiliki kecenderungan nasionalis sangat membahayakan kedudukan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian melakukan tekanan dan intimidasi kepada para pemimpin Tionghoa yang aktif melakukan perlawanan dan memaksa mereka yang berada di luar negeri untuk kembali ke Hindia Belanda. Selain itu, para pemimpin

peranakan Tionghoa dan pengusaha banyak yang tidak mendukung kampanye ini karena mereka merasa sudah memiliki posisi yang kuat di Hindia Belanda. Faktor lain yang turut menyurutkan kampanye tersebut adalah kurangnya dukungan dari pemerintah nasionalis Tiongkok yang sedang menghadapi banyak persoalan di dalam negerinya. Orang Tionghoa memang gagal untuk menolak menjadi kawula, tetapi usaha untuk memperoleh status Eropa juga diabaikan oleh pemerintah Belanda dengan alasan akan melukai perasaan golongan bumiputra yang akan menimbulkan pergolakan di Hindia Belanda.

Meski kampanye penolakan Undang-Undang Kekawulaan gagal, dikarenakan Belanda telah membatalkan wajib milisi untuk kawula, serta Tiongkok sendiri tetap menandatangani perjanjian konsuler dengan Belanda, Sin Po yang berada di bawah pimpinan Tjoe terus maju melakukan perlawanan (Suryadinata, 1996: 14–15). Selain menjadi penggerak nasionalisme Tionghoa, dia juga menganjurkan orang peranakan Tionghoa agar tetap berorientasi ke Tiongkok (Lee, 2013: 174–175). Menurut pandangannya, nasib peranakan bergantung kepada Tiongkok (Rohmah, 2014: 399). Jika peranakan tidak menyadari hal ini dan tidak berusaha menjadi orang Tionghoa, nantinya mereka akan mengalami lebih banyak kesusahan.

Sin Po *Wekelijksche Editie* tanggal 26 Desember 1925 menyebutkan bahwa Tjoe tidak menjelaskan secara jelas mengenai kesusahan yang akan dihadapi oleh warga peranakan. Kemungkinan dia merasa bahwa Tiongkok tidak akan menghiraukan warga peranakan karena mereka sudah bukan orang Tionghoa lagi. Tanpa perlindungan dari Tiongkok, warga peranakan akan menderita. Kemungkinan lain yang disebutkan oleh Suryadinata (2010: 11) sebagai perbandingan adalah orang Jepang yang dihiraukan di Hindia Belanda karena negaranya kuat.

Tjoe berpendapat bahwa warga peranakan tidak bisa menjadi *indier* (orang Hindia) dikarenakan konsep itu tidak praktis. Berikut kutipan pernyataan Goan dalam Sin Po *Wekelijksche Editie* tanggal 26 Desember 1925.

*“Orang jangan lupa perhatikan bahwa orang bumiputra sendiri mulai bangunan mereka punya pride of blood (kebanggaan atas darah mereka) dan mampu mempertahankan kebangsaannya. Tuan Tjoe percaya bahwa suatu waktu bumiputra akan jadi merdeka dan jadi tuan atas tanah air mereka sendiri. Kita orang Tionghoa perlu bisa adakan persahabatan yang sangat erat dengan tuan tanah asli, sementara itu sambil memegang teguh kebangsaan dan tetap menjadi bagian dari Chinesenatie (Suryadinata, 1990:11–12).”*

Untuk mencapai hal tersebut, Tjoe menganjurkan bahwa orang Tionghoa harus mengutamakan pendidikan Tionghoa dan terus belajar bahasa Tionghoa. Isi dari pendidikan Tionghoa tidak harus dititikberatkan pada pendidikan yang mengejar “ilmu mencari uang” saja, dikarenakan hal ini hanya menghasilkan kerani-kerani yang memakan gaji besar atau pedagang-pedagang yang masing-masing memiliki keuntungan pribadi. Hal yang terpenting adalah menggalakkan *nationale onderwijs* (pendidikan nasional) – dia tidak menjelaskan isi pendidikan itu. Kemungkinan yang dimaksudkannya adalah pendidikan yang mengandung bahasa dan kebudayaan Tionghoa serta kesadaran ketionghoan (Suryadinata, 2010: 12).

Menurutnya, warga Tionghoa dan pribumi di Hindia Belanda sama-sama bangsa Asia dan dalam perjuangan kemerdekaan harus saling menyokong. Tidaklah mengherankan ketika memimpin *Sin Po*, dia banyak memakai wartawan pribumi dan menggunakan berita tentang pergerakan yang ditulis oleh penulis pribumi. Nasionalis Indonesia rupanya senang bekerja sama dengan redaksi itu karena mereka masih kekurangan media massa yang bisa menyebarkan ide nasionalisme Indonesia (Suryadinata, 2010: 12). Mereka banyak menyinggung mengenai kesulitan yang dihadapi oleh *kaum kromo* dan ketidakpuasan penduduk bumiputra terhadap kebijakan pemerintah kolonial.

Dalam *Memoar Ang Jan Goan* (2009: 59–60) disebutkan bahwa ketika Soekarno masih menjadi mahasiswa di *Technische Hoogeschool* (sekarang Institut Teknologi Bandung), dia sudah dekat dengan beberapa orang peranakan Tionghoa yang berpandangan nasionalisme Tionghoa, yaitu Tan Tek Ho (penulis *Sin Po* dan mantan murid dari Kay Lam Hak Tong di Nanking) dan Liem Soei Tjoan (pencetak dan penyokong *Sin Po*). Melalui keduanya, dia berkenalan dengan Tjoe dan pernah mengunjungi kantornya yang berada di Asemka, Glodok, Batavia pada September 1923. Seperti diungkap pula dalam memoar tersebut, saat itu Soekarno mengatakan kepada Tjoe bahwa dia lebih menghargai orang Tionghoa yang mengambil haluan nasionalisme Tionghoa dan menyokong pergerakan Indonesia tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam nyawanya, dibandingkan dengan orang-orang yang mau menjadi Indonesia semata-mata hanya karena ingin mendapatkan keuntungan (Goan, 2009: 60).

Rupanya, yang dipikirkan oleh para nasionalis Indonesia waktu itu hanyalah cara dalam mengusir Belanda dari Hindia Belanda. Masalah mengenai Tionghoa belum terlalu dipikirkan lebih jauh. Nasionalis Tionghoa sendiri hanya memikirkan bahwa mereka akan mempunyai musuh dan pengalaman yang sama. Faktor tersebut kemungkinan akan menjadi dasar kerja sama antara warga peranakan Tionghoa dengan pribumi. Para nasionalis Tionghoa tidak memikirkan apabila bentrok dengan warga pribumi setelah Hindia Belanda merdeka. Mereka berpikir jika terjadi bentrokan nantinya akan dilindungi oleh Tiongkok dan perkaranya akan selesai (Suryadinata, 2010: 13).

#### **D. Kritik terhadap Fromberg**

Tjoe mengidentifikasi diri dengan nasionalis Tionghoa di Tiongkok (Suryadinata, 1988: 105). Dia merasa bahwa warga Tionghoa di Hindia Belanda (baik peranakan maupun totok) harus menganggap diri mereka Tionghoa (Setiono, 2008: 479). Warga Tionghoa di Hindia Belanda adalah orang asing. Mereka tidak harus mengambil bagian dalam politik lokal karena nasib mereka bergantung kepada Tiongkok, bukan kepada Belanda (Lee, 2013: 174).

Pandangannya itu berseberangan dengan P.H. Fromberg Sr, yaitu ahli hukum Belanda yang pernah bertugas di Hindia Belanda sebagai pejabat Biro Urusan Tionghoa dan dekat dengan masyarakat peranakan Tionghoa. Sikap yang ditunjukkan Fromberg berbeda sekali dengan pembesar Belanda yang dianggap memusuhi masyarakat Tionghoa. Dia

adalah pembesar Belanda yang bersimpati terhadap orang Tionghoa (Suryadinata, 1990: 5). Menurut Suryadinata (2010: 5), untuk membela orang Tionghoa, dia menulis catatan-catatan kecil yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Chung Hwa Hui Nederland dengan judul *Pergerakan Orang Tionghoa di Jawa* pada 1926.

Tjoe sendiri menganggap bahwa Fromberg adalah “Douwes Dekker-nya” orang Tionghoa. Dia tidak setuju dengan pendapat Fromberg mengenai nasionalisme Tionghoa dan mengkritiknya berkali-kali di Sin Po, meskipun mengakui jasanya. Dia akhirnya menerbitkan beberapa terjemahan tulisan-tulisan Fromberg serta kritiknya sendiri menjadi sebuah buku pada 1921 berjudul *Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda dan Mr. P.H. Fromberg Sr* (San, 1921: 1–120). Sebelum terbit, tulisan-tulisan dari Fromberg sendiri awalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat secara bersambung di Sin Po edisi Melayu (Suryadinata, 2010: 5–6).

Fromberg berpendapat bahwa warga Tionghoa pada akhir abad ke-19 diperlakukan tidak adil di Hindia Belanda (misalnya diskriminasi berupa pemberian keistimewaan khusus kepada etnis Tionghoa dibandingkan golongan masyarakat lainnya) dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya *Pan-Chinese Movement* (Gerakan Tionghoa Raya). Orang Tionghoa lantas berorientasi ke Tiongkok dan sadar akan rasnya sendiri. Mereka merasa terhina karena ditempatkan di bawah orang Eropa dan menuntut agar diberi status yang sama, tetapi usaha ini gagal (Suryadinata, 1986: 45–50).

Lebih lanjut, dia menengarai bahwa orang Tionghoa tidak senang ketika Undang-Undang Kekawulaan diumumkan dan kaum peranakan Tionghoa digolongkan sebagai kawula. Mereka berpikir bahwa Belanda berniat menghilangkan kewarganegaraan orang Tionghoa, sedangkan kekawulaan tidak memberikan sesuatu yang baru bagi mereka. Masalah mengenai milisi akhirnya memancing peningkatan kampanye menentang kekawulaan, tetapi kampanye masih berlanjut setelah rancangan itu ditinggalkan. Fromberg berpendapat bahwa hal ini disebabkan orang peranakan Tionghoa telah terpengaruh oleh semangat nasionalisme Tionghoa, tetapi tidak mengerti tentang hukum (Suryadinata, 2010: 6).

Bagi dirinya, kekawulaan hanya menyangkut peranakan Tionghoa yang terus tinggal di Hindia Belanda sejak beberapa generasi. Dia menunjuk kelompok-kelompok minoritas di negara-negara lain yang mengeluhkan bahwa mereka dihalangi untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya dan diperlakukan sebagai orang-orang asing, sekalipun telah tinggal di negara bersangkutan sejak beberapa generasi. Sebaliknya, kaum peranakan Tionghoa di Hindia Belanda malah menolak untuk menerima kekawulaan setelah ditawarkan oleh Belanda. Mereka seperti tidak mengetahui bahwa kekawulaan disertai dengan hak yang menarik batas antara seorang kawula dengan orang asing. Dia menerangkan tentang hak dan manfaat yang dapat dinikmati oleh seorang kawula. Salah satu contoh yang ditunjukkannya adalah hak untuk ikut serta dalam politik setempat (Suryadinata, 2010: 6–7).

Fromberg beralasan bahwa menerima kekawulaan tidak berarti bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda harus meninggalkan bahasa dan adat istiadat mereka. Kekawulaan untuk sementara waktu hanya suatu keterangan atau pengenalan mengenai keanggotaan

dalam masyarakat Hindia Belanda. Berikut pendapat Fromberg yang diambil dari tulisan Suryadinata (1986: 45–50) berjudul *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*.

*“Waktunya akan datang ketika kesombongan orang-orang kulit putih akan terhapus dan berbagai kelompok akan dibuat sederajat di depan hukum. Jika perasaan rasial dari masing-masing kelompok dihormati dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, berbagai kelompok akan berhenti memperjuangkan kepentingan bersama. Pada saat itu, kesatuan berbagai kelompok akan menjadi kenyataan dan timbullah suatu pergerakan ke arah terbentuknya suatu nasion (Suryadinata, 1986: 45–50).”*

Dia memercayai bahwa sebagian besar peranakan Tionghoa tidak setuju dengan kampanye gerakan anti Undang-Undang Kekawulaan. Dia senang bahwa ada orang peranakan berpendidikan yang mau bekerja untuk Belanda dan tidak mengurung dirinya di kelompoknya sendiri. Dua contoh yang diberikannya adalah Yap Hong Tjoen (ahli mata yang pernah menjadi ketua perkumpulan mahasiswa Tionghoa di Belanda) dan H.H. Kan (tuan tanah dan politisi). Dia akhirnya berkesimpulan bahwa kampanye anti kekawulaan dilancarkan oleh kaum sauvinis Tionghoa. Mereka hanya memanfaatkan masalah milisi dan kekawulaan untuk mengungkapkan rasa sauvinisme<sup>1</sup> dan rasa menyendiri yang mereka miliki. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan kepentingan Belanda dan hanya akan membahayakan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda sendiri (Suryadinata, 2010: 7).

Tjoe mengemukakan sanggahan bahwa Fromberg sebagai seorang *Nederlander* telah gagal untuk memahami gerakan orang Tionghoa di Hindia Belanda. Fromberg benar ketika mengatakan bahwa gerakan Tionghoa sebelum kampanye ada kaitannya dengan hukum-hukum yang diskriminatif dan bertujuan untuk menaikkan status orang Tionghoa di Hindia Belanda agar setara dengan orang-orang Eropa, tetapi gerakan lain yang dikenal sebagai kampanye anti Undang-Undang Kekawulaan bertujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan Tiongkok. Tjoe mengatakan bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda merasa diri mereka sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan nasion Tionghoa yang besar (Suryadinata, 2005: 24–25). Sebagai satu kelompok tersendiri, orang Tionghoa di Hindia Belanda tidak mempunyai arti apa pun di mata dunia karena jumlahnya kecil, tetapi mereka mempunyai arti penting jika bergabung dengan ratusan juta orang Tionghoa di Tiongkok (Kurniawan, 2014: 23). Kekawulaan justru memisahkan mereka – kaum peranakan – dari totok dan memaksa setiap orang peranakan untuk menjadi kawula. Dia beralasan bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda ingin tetap menjadi orang asing, tetapi penguasa Belanda justru mengangkat H.H. Kan dan Liem A. Pat sebagai wakil Tionghoa di Hindia Belanda (Suryadinata, 2010: 8).

Sementara itu, langkah-langkah ke arah wajib dinas militer untuk kaum peranakan diusulkan oleh *Volksraad*. Sejarahwan Ong Hok Ham (2005: 134) menyebut bahwa orang Tionghoa tidak mempunyai wakil di sana, kecuali “wakil-wakil” yang ditunjuk oleh

---

<sup>1</sup> Sauvinisme atau sovinisme (bahasa Inggris: *chauvinism*) adalah ajaran atau paham mengenai cinta tanah air dan bangsa (*patriotisme*) yang berlebihan. Makna ini kemudian diperluas hingga mencakup fanatisme ekstrem dan tak berdasar terhadap suatu kelompok yang diikuti pengikutnya. Istilah ini diambil dari nama Nicolas Chauvin, seorang prajurit pada zaman Napoleon Bonaparte, yang fanatik terhadap kaisarnya meskipun Chauvin sendiri miskin, cacat, dan menerima perlakuan buruk.

Belanda sendiri. Belanda bersikeras mengatakan bahwa *Volksraad* adalah Dewan Rakyat dan keputusan-keputusannya harus dianggap sebagai keputusan-keputusan rakyat. Pada tahap ini, kampanye menentang kekawulaan dimulai. Tjoe mengatakan bahwa kelompok ini berhasil memperoleh dukungan dari 28.789 kepala keluarga yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Tiongkok dalam waktu singkat, setelah Sin Po mengemukakan pendiriannya secara jelas. Harian tersebut ditunjuk sebagai wakil mereka untuk menentang kekawulaan. Dia mengklaim bahwa ada telegram dan surat dari beberapa ratus organisasi yang menyatakan persetujuan dengan redaksi tersebut. Organisasi-organisasi itu kemudian bergabung dan mengirim delegasi bersama ke Tiongkok. Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh kampanye yang dilakukan oleh Sin Po semata. Berdasarkan pandangannya, Fromberg hanya menerima pidato dari Kan dan Yap saja – yang hanya mewakili kepentingan para opsir dan pengusaha Tionghoa (Setiono, 2008: 479; Suryadinata, 2010: 8–9).

Dalam Sin Po tahun 1921 berjudul *Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda dan Mr. P.H. Fromberg Sr*, Tjoe selanjutnya mengecam Fromberg karena konsepnya mengenai “kepentingan bersama” (San, 1921: 88). Fromberg berpandangan bahwa *onderdaanschap* (kekawulaan) biasanya sama dengan *nationaliteit* (kewarganegaraan) dan hakikat dari kewarganegaraan adalah kepentingan bersama. Dia setuju dengan pandangan ini, tetapi mengemukakan argumen bahwa tidak ada kepentingan bersama di Hindia Belanda. Kepentingan kelompok Tionghoa berbeda dengan kepentingan kelompok-kelompok lain. Dia menyalahkan politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda, seperti halnya sistem wilayah untuk tinggal dan sistem surat jalan. Sistem tersebut menyebabkan orang Tionghoa tetap terpisah dari kelompok ekonomi lainnya. Dia juga mengajukan pendapat bahwa sistem sekolah terpisah yang diterapkan saat itu telah memperpanjang separatisme orang Tionghoa. Hal tersebut dikarenakan rasa kepentingan kelompok begitu kuat, sehingga tidak ada kepentingan bersama, yang ada hanyalah kepentingan kelompok (Suryadinata, 2010: 9).

Menurut Tjoe, orang Tionghoa sebagai satu kelompok minoritas berada dalam kedudukan yang sangat sulit. Mereka terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Tjoe menulis di Sin Po tahun 1921 sebagai berikut.

*“Di belakangnya orang Belanda ada Nederland yang pegang Souvereiniteit dari Hindia. Di belakangnya bumiputra ada 30 juta jiwa, yang bukan saja kuat lantaran jumlahnya yang besar, tetapi karena mereka juga punya kedudukan – sebagai pribumi yang tidak dapat disangkal haknya. Di belakang orang Tionghoa ada apakah yang bisa disandarkan, kalau mereka terus mau mati dan hidup di Hindia Belanda dengan terus menjadi satu golongan kecil? Di belakang Tionghoa Hindia Belanda tidak ada apa-apa, bahkan kalau badan penasihat Volksraad berkembang menjadi suatu parlemen, kepentingan kelompok Tionghoa tidak bisa dilindungi karena mereka adalah minoritas (Suryadinata, 2010: 9).”*

Bagi Tjoe, satu-satunya pemecahan masalah itu adalah orang Tionghoa di Hindia Belanda berasimilasi sepenuhnya dengan kelompok-kelompok lain. Hanya dengan berbuat demikian, masalah Tionghoa dapat dipecahkan, tetapi pemecahan ini tidaklah mungkin terjadi karena jurang yang memisahkan berbagai kelompok demikian lebar dan masyarakat sadar akan perbedaan etnis di antara mereka. Orang Tionghoa tidak mau menyerahkan masa depannya ke tangan orang Belanda karena mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Mereka tidak memperoleh manfaat apa pun dari pemerintah kolonial dan memutuskan tidak menjadi kawula, sebab mereka adalah orang Tionghoa yang mempunyai hubungan dengan Tiongkok (Suryadinata, 2010: 9–10).

Bertolak dari teorinya tentang kepentingan kelompok, dia berpandangan bahwa pertahanan Hindia Belanda bukanlah suatu kepentingan bersama, melainkan hanya kepentingan para kapitalis Belanda. Dia mengemukakan sanggahannya dalam *Sin Po* tahun 1921 sebagai berikut.

*“Indie Weebaar bukanlah satu kepentingan umum, melainkan ada satu kepentingan di situ. Bukan kepentingan orang bumiputra, juga bukan orang Indo-Belanda. Tanah siapakah yang akan dipertahankan oleh orang Tionghoa, karena mereka tidak diperkenankan memiliki tanah? Dalam kenyataannya, orang Tionghoa akan mempertahankan tanah orang Belanda. Apabila pertahanan Hindia Belanda tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang Tionghoa, sebaliknya pertahanan negeri Tiongkok benar-benar menyangkut kepentingan mereka. Kalau negeri Tiongkok menjadi kuat, status orang Tionghoa di Hindia Belanda akan menjadi lebih baik. Pemerintah Belanda akan menyetujui orang Tionghoa memperoleh status Eropa (seperti orang-orang Jepang yang diberikan status tersebut setelah mengalahkan Rusia)”* (Setiono, 2008: 479–480; Suryadinata, 1990: 10).

Jelaslah Fromberg dan Tjoe mempunyai pandangan yang berbeda tentang lahirnya nasion Hindia Belanda. Fromberg yang berpandangan asosiasi berpendapat bahwa nasion ini akan lahir, tetapi Tjoe tidak sependapat dan tetap mempertahankan nasionalisme Tionghoanya. Pandangannya itu bahkan juga membuatnya bertikai dengan Tek Kong. Tek Kong yang tidak betah tinggal di Tiongkok akhirnya memutuskan untuk menerima kekawulaan dan kembali ke Hindia Belanda. Dia akhirnya menerbitkan sebuah surat kabar Melayu (Indonesia) pada 1923 bernama *Keng Po* (koran yang bersaing) karena tidak bisa masuk lagi ke *Sin Po* (Suryadinata, 1990: 10–11).

Keyakinan Tjoe juga ditampilkan dalam buku berjudul *Doea Kepala Batoe* yang ditulis oleh Tjiat pada 1924. Buku tersebut berisi perdebatan antara Tjoe dan Yap. Yap sendiri adalah seorang anggota *Chung Hwa Hui Nederland* yang memiliki pandangan sama seperti Fromberg (Salmon, 1981: 201).

## E. Tjoe dan Perkembangan Sin Po

Sin Po semakin berkembang ketika berada di bawah kepemimpinan Tjoe (Suryadinata, 1984: 120). Beberapa inovasi yang dilakukannya adalah menerbitkan Sin Po Chineseche Editie (edisi bahasa Tionghoa) pada 12 Februari 1921, Bin Seng (versi lebih murah dari harian Sin Po) pada 12 Februari 1922 (Leo, 2010: 28–29) – dengan editor dirinya sendiri yang menggunakan nama pena Oen Tjip Tjong, Sin Po Oost-Java Editie (edisi Jawa Timur di Surabaya yang kelak berubah namanya menjadi Sin Tit Po dan dipimpin oleh Liem Koen Hian) pada Juli 1922, dan Sin Po Wekelijksche Editie (edisi mingguan) pada 7 April 1923 (Leo, 2010: 29; Salmon, 1981: 358).



Gambar 5. Sin Po

Sumber: *Sin Po Jubileum Nummer 1910–1935*

Pada 1 Desember 1922, Tjoe lantas mengundang beberapa tenaga muda seperti Ang Jan Goan (mantan murid dari Kay Lam Hak Tong yang mengajar di THHK Bandung) dan Kwee Kek Beng (lulusan *Hollandsche Chineesche Kweekschool* atau sekolah guru Belanda untuk warga Tionghoa di *Meester Cornelis* – sekarang Jatinegara, Jakarta Timur) karena pekerjaannya semakin bertambah (Leo, 2010: 45–46; Rohmah, 2014: 398; Setiono, 2008: 447; Setyautama, 2008: 6). Goan sendiri paham mengenai bahasa Melayu, Inggris, dan Tionghoa (Setyautama, 2008: 6). Dia lantas menjadi pengikut Tjoe yang setia di kemudian hari (Suryadinata, 1984: 103). Keduanya memang sudah dekat sejak lama karena Tjoe sering ke Bandung untuk berbincang dan bertukar pikiran dengan Goan. Saat itu, Tjoe baru ditinggal mati istri dan anaknya, sehingga dia hidup seperti bujangan. Menurut Goan dalam Sin Po Wekelijksche Editie tanggal 26 Desember 1925, istri dan anak-anak Tjoe meninggal sekitar tahun 1917 (Suryadinata, 1990: 13). Sementara itu, Suryadinata (2010: 13) berspekulasi bahwa Tjoe pernah menikah sebanyak dua kali jika pernyataan tersebut benar.



Gambar 6. Ang Jan Goan

Sumber: *Sin Po Wekelijksche Editie*, “*Almarhoem Tjoe Bou San*”, tanggal 26 Desember 1925

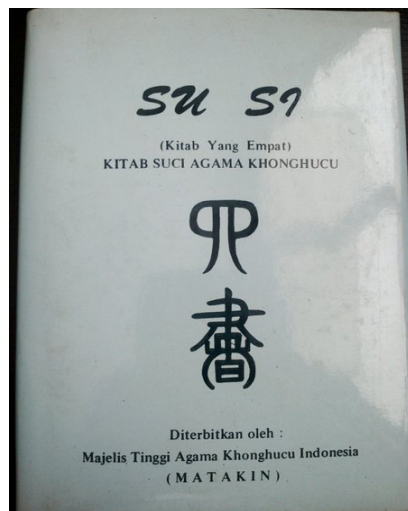
Setelah menjadi pembantu redaksi tersebut, Goan juga mengambil haluan nasionalis Tionghoa dan menyokong pergerakan Indonesia. Pada 1925, dia menyiarkan tulisan Tjiat berjudul *Bahaya Putih* tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tjoe. Artikel itu bermaksud mengimbangi tulisan orang kulit putih yang sering membicarakan tentang *Bahaya Kuning*. Tidakannya tersebut membuatnya diseret ke meja hijau. Sebelum perkara itu selesai, Goan juga menyiarkan berita tentang penembakan anjing gila yang mengakibatkan tewasnya dua orang pribumi karena keteledoran polisi Belanda. Hal ini juga mengakibatkan dirinya mendapat kesulitan, tetapi dia akhirnya dibebaskan dari kedua tuduhan itu karena kepandaian dari pembelanya (Suryadinata, 2010: 14).

Eksistensi *Sin Po* edisi Jawa Timur ternyata kalah dibandingkan dengan *Pewartu Surabaya*. Hal inilah yang membuat para pegawainya mau memotong gajinya secara sukarela agar dapat bertahan. Tjoe mengatakan bahwa pemotongan tersebut dijadikan sebagai hutang perusahaan dan akan dikembalikan kalau redaksi yang dipimpinnnya itu mendapatkan keuntungan kembali (Goan, 2009: 81–82). Namun, *Sin Po* edisi Jawa Timur tetap tidak tertolong dan terpaksa gulung tikar. Pada 1924, saham percetakan itu kemudian dibeli oleh Hian dan namanya diubah menjadi *Sin Tit Po* tanggal 25 September 1932. Demikian halnya dengan Bing Seng yang juga harus berhenti terbit karena menderita kerugian. *Sin Po* yang dapat bertahan hanyalah edisi Melayu dan Tionghoa pusat (Suryadinata, 1990: 14).

## F. Karya Sastra

Kesehatan Tjoe semakin menurun sekitar tahun 1924 dan dia jarang menulis mengenai hal-hal berbau politik. Dia lebih banyak membaca buku-buku filsafat dan menerjemahkan buku-buku Tiongkok klasik, yaitu *Da Xue* atau *Thai Hak* (Kitab Ajaran Besar), *Zhong Yong* atau *Tiong Yong* (Kitab Tengah Sempurna), *Lun Yu* atau *Leon Gie* (Kitab Sabda Suci), dan *Beng Tjoe* atau *Meng Zi* (Kitab Bingcu) yang dimuatnya di *Sin Po* dengan nama samaran Hauw San Liang (Suryadinata, 2010: 13). Keempat buku tersebut terkenal dengan nama *Soe Sie* atau *Sishū* (Buku yang Empat) (Yao dan Yao, 2000: 62) – di Indonesia disebut dengan *Su Si* oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) (Matakin,

1970: 1–10) – dan menjadi salah satu kumpulan kitab suci agama Konghucu (Gardner, 2007: 131–134).



Gambar 7. Su Si

Sumber: Majelis Tinggi Agama Konghucu

Goan memang berpendapat bahwa Tjoe dapat memahami bahasa Tionghoa dan menerjemahkan karya klasik tersebut langsung dari bahasa aslinya, tetapi Suryadinata menyatakan jika Tjoe kurang memahami bahasa Tionghoa dan sering mengunjungi Sinse Pang Kam (seorang guru totok) untuk menanyakan kata-kata yang sukar dalam *Sishū*. Dia dikatakan selalu mengantongi buku tersebut ketika berkunjung ke rumah *sinse* itu (Suryadinata, 2010: 14–15).

Tjoe tetap bersikap kritis terhadap ajaran Konghucu, meskipun telah menerjemahkan *Sishū* dan menganggap Kong Hu Cu sebagai seorang guru besar kebudayaan Tionghoa. Salah satu yang dikritisinya adalah konsep *Hauw* (realisasinya berpengaruh kepada tiga alam, yaitu langit mempunyai ketertiban, bumi mempunyai kebenaran, dan rakyat mempunyai perilaku) (Abdullah, 2002: 74) yang menyuruh agar anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Tjoe, hal tersebut tidak wajar dan tidak memiliki dasar yang kuat – Suryadinata (2010: 15) menganggap bahwa Tjoe dan Goan kurang mendalami kitab-kitab klasik ini. Berikut kritikan Tjoe yang dikutip dari tulisan Goan berjudul *Almarhoem Tjoe Bou San*.

*“Natuur-nya manusia seperti juga natuur-nya makhluk lain, adalah sang ibu-bapak yang sewajarnya mencintai anaknya, tetapi Hauw mau mencoba membuat sang anak jadi lebih mencintai orang tuanya. Seorang anak Hauw tidak sedikit yang palsu, tetapi cinta anak kepada ibu-bapak umumnya telen”* (Suryadinata, 2010: 15).

Suryadinata (2010: 15) menyebut bahwa Tjoe juga mempelajari *Chuang Tzu* (*Zhuangzi*) dan *Tao Te Ching* (*Dao De Jing*). Menjelang akhir kehidupannya, pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Lao Tzu (Lao Zi) yang menganjurkan *boet wi* atau *wu wei* (tidak berbuat apa-apa). *Wu wei* yang menjadi konsep sentral dalam Taoisme bukanlah sesuatu yang dapat dipahami melalui wacana intelektual saja, tetapi kedalamannya hanya dapat diterima oleh seseorang ketika mereka sudah cukup rendah

untuk melepaskan pengendalian hidup dan menjalaninya dengan prinsip spontanitas (Pitoyo, 2006: 264–266; Widisuseno, 2011: 6–12). Lao menjelaskan bahwa fenomena harmonis dengan Tao adalah fenomena alami, misalnya sebatang pohon hanya akan tumbuh tanpa mencoba tumbuh. Lebih lanjut, menurutnya tujuan praktik spiritual dalam diri manusia adalah mempertahankan perilaku yang alami (Goddard, 1939: 15–20; Pitoyo, 2006: 257–259).

Salah satu perkataan dari Lao yang memberikan pengaruh dalam diri Tjoe menjelang ajalnya adalah “Selama kita tidak berbuat apa-apa, tidak akan ada yang tidak diperbuat. Kita memiliki kekhawatiran lantaran sadar diri, apalagi yang kita khawatirkan apabila hal tersebut ditiadakan?” Goan mensinyalir bahwa Tjoe kemudian jarang menulis lagi karena perkataan itu. “Seseorang yang memakai ‘kacamata’ Lao untuk memandang urusan dunia akan mendapati kenyataan bahwa dunia tidak begitu penting,” ungkap Goan (Goan, 2009: 59–60).

Tjoe pernah berkata kepada Goan bahwa dirinya khawatir apabila nantinya tidak dapat menulis lagi. Dia sering menyatakan keinginannya untuk hidup dengan sederhana dan tinggal dalam satu sudut aman yang terpisah dari kekalutan dunia. Goan melihat konflik batin yang dialami Tjoe – di satu sisi dia menampilkan diri sebagai seorang pejuang, sedangkan di sisi lain dia menganut filsafat yang pasif (Goan, 2009: 60). Suryadinata (2010: 16) menyatakan bahwa filsafat pasif yang dianut oleh Tjoe itu baru dianutnya setelah dia sering mengalami sakit dan banyak merenung. Goan (2009: 60) menambahkan bahwa Tjoe juga tertarik kepada *Bhagawadgita* yang ditulis oleh Sri Krishna Dvipayana Vyasa atau Resi Byasa. Hal inilah yang membuat Suryadinata (2010: 16) berkesimpulan bahwa Tjoe lebih cenderung kepada filsafat klasik yang pasif dibandingkan dengan nasionalisme Tionghoa ketika kesehatannya semakin menurun.

Tjoe memang lebih dikenal sebagai seorang wartawan dan pemimpin nasionalisme Tionghoa, dibandingkan dengan seorang sastrawan produktif pengarang novel. Menurut Goan (2009: 60–61), Tjoe senang membaca buku kesusastraan sajak-sajak kuno Tiongkok gubahan Li Po (juga dikenal dengan Li Pai, Li Bai, dan Li T'ai -pai) dan Du Fu (Tu Fu) dari Dinasti Tang serta karya William Shakespeare seperti *Hamlet*, *Macbeth*, dan *Romeo dan Julia*.

Menurut Goan (2009: 60–61), novel yang digemari oleh Tjoe umumnya bercerita tentang pengorbanan dalam percintaan. Pandangan tersebut sebenarnya telah tercermin dalam novel yang telah dihasilkannya sejak tahun 1913. Novel terjemahan pertamanya adalah *Penghidoepan Radja Belgie, Satoe Tjerita jang Betoel Telah Kedjadian di Europa* yang terbit pada 1913 – sumber novel tersebut tidak diketahui. Pada 1917, dia menerbitkan dua buah novel dengan nama samaran Hauw San Liang, yaitu *Satoe Djodo jang Terhalang* dan *Tjerita Pendjahat di Parys* (Suryadinata, 1988: 118). *Satoe Djodo jang Terhalang* mengambil latar belakang di Bogor yang mengisahkan tentang tragedi percintaan antara dua pemuda-pemudi Tionghoa, keduanya dipisahkan oleh orang tua si gadis yang ingin menjodohkannya dengan lelaki pilihan mereka, sedangkan *Tjerita Pendjahat di Parys* adalah terjemahan novel berbahasa Prancis yang tidak diketahui sumbernya dan pertama kali diterbitkan di Tjhoen Tjhioe (Salmon, 1981:359).

Pada 1918, Tjoe menerbitkan tiga buah novel, yaitu *Djadi Korbannja Napsoe atawa Siotjia Idoeng Poeti: Satoe Tjerita jang Belom Lama Soeda Kedjadian di Soerabaja, Dengan Setalen Mengitari Boemi* – terjemahan novel berbahasa Prancis berjudul *Les Cinq Sous de Lavarède* yang ditulis oleh Paul d'Ivoi dan Henri Chabrillat, serta *Binasa Lantaran Harta* yang disambung dengan *Badjingan Besar* (juga terbit pada tahun yang sama). Novel *Binasa Lantaran Harta* ditulis Tjoe dengan nama samaran San Ling Hauw (Lan, 1962: 113; Salmon, 1981: 359). Tema ceritanya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki Tionghoa yang tamak karena harta, sedangkan latar belakang cerita ini adalah di Jawa tahun 1912 (Suryadinata, 2010: 17).

Salah satu novel terbaiknya adalah *The Loan Eng* yang terbit pada 1922 dan ditulis dengan nama samaran Getoel Gaet. Novel itu menceritakan tentang seorang gadis bernama Loan Eng yang diasuh oleh pamannya. Ketika seorang pemuda yang bernama Yo Kim Sioe mengetahui bahwa paman Eng akan meninggalkan seluruh hartanya kepada gadis itu, Yo yang tidak pandai dan sangat ambisius mulai memacari Eng. Menurut Nio Joe Lan (penulis buku sastra Indonesia-Tionghoa), Tjoe pandai menggunakan kata-kata dan bahasa percakapan dalam novelnya tersebut. Hal inilah membuat *The Loan Eng* menjadi salah satu novel terbaik yang ditulis oleh warga peranakan sebelum Perang Dunia II (Lan, 1962: 30). Novel ini disusul dengan *Lima Tahoen Kemoedian* yang juga terbit pada 1922 (Suryadinata, 2010: 17).

Tjoe memang tidak banyak menulis karangan mengenai politik dan masyarakat Tionghoa di Sin Po setelah kesehatannya menurun. Namun, serial novelnya berjudul *Salah Mengerti* dan *Hoan Tjeng Lao* atau *Fenzhuang Lou* (Kamar Hias Wanita) masih dimuat dalam mingguan Sin Po pada 1925 dan baru selesai setelah dia meninggal (Setyautama, 2008: 460; Suryadinata, 2010: 18). Dia menghembuskan nafas terakhir pada 3 November 1925 ketika berusia 34 tahun (Setyautama, 2008: 460). Sehari sebelumnya, dia masih masuk ke kantor dan tidak ada tanda apa pun. Menurut Sin Po, kematiannya disebabkan oleh penyakit paru-paru. Tjoe meninggalkan seorang istri, dua orang anak perempuan, dan ide nasionalisme Tionghoanya. Setelah kematiannya, beberapa teman dekatnya mengambil alih tugasnya di Sin Po. Goan lantas diangkat menjadi direktur dan Kek Beng menjadi pemimpin redaksi (Leo, 2010: 46; Rohmah, 2014: 398; Setiono, 2008: 446–447; Setyautama, 2008: 145).

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tjoe Bou San yang memiliki nama pena Oen Tjip Tjong dan Hauw San Liang, serta nama samaran San Ling Hauw dan Getoel Gaet adalah tokoh nasionalis Tionghoa di Hindia Belanda yang lahir di Batavia tahun 1891 dan meninggal di Batavia tanggal 3 November 1925. Dia memulai karier menulis untuk surat kabar Hoa Pit dan Perniagaan. Pada 1919, dia membeli saham Hauw Tek Kong dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin redaksi yang merangkap jabatan sebagai direktur Sin Po. Koran itu lantas menjadi pelopor nasionalisme Tionghoa yang cukup berpengaruh di Hindia Belanda. Tjoe sendirilah yang mengembangkan

konsep nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda dan memimpin kampanye dalam memberantas kekawulaan Belanda ketika berlangsung Perang Dunia I. Dia merasa bahwa warga Tionghoa di Hindia Belanda (baik peranakan maupun totok) harus menganggap diri mereka Tionghoa.

Tjoe banyak menulis kritik-kritikannya melalui surat kabar *Sin Po*. Tulisan-tulisan maupun kritiknya terkenal tajam, sehingga sering menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Pandangan nasionalismenya itu berseberangan dengan beberapa tokoh, yaitu P.H. Fromberg Sr, Yap Hong Tjoen, dan Hauw Tek Kong. Selain dikenal sebagai wartawan dan pemimpin pergerakan nasionalisme Tionghoa, dia juga merupakan seorang penulis novel. Salah satu novel terbaiknya adalah *The Loan Eng* yang terbit pada 1922.

Ketika kesehatannya semakin menurun, dia jarang menulis mengenai hal-hal berbau politik, tetapi lebih banyak membaca buku-buku filsafat dan menerjemahkan buku-buku Tiongkok klasik. Pemikirannya saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Lao Zi (Lao Tzu) yang menganjurkan *wu wei* atau *boet wi* (tidak berbuat apa-apa). Dia meninggal pada 3 November 1925 ketika berusia 34 tahun. Menurut berita *Sin Po*, kematiannya disebabkan oleh penyakit paru-paru.

## **B. Saran**

Tulisan ini merupakan hasil kajian yang bisa jadi tidak melalui proses penulisan yang utuh dan menyeluruh karena hanya memusatkan perhatiannya kepada peranan pergerakan Tjoe Bou San dalam memelopori nasionalisme Tionghoa. Ruang lingkungannya pun terbatas pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Oleh karena itu, saran kepada semua pihak, terutama kepada para peneliti, penulis, dan peminat sejarah agar dapat menuangkan ide-idenya terkait tokoh-tokoh pelopor nasionalisme Tionghoa lain yang cukup berpengaruh di Hindia-Belanda dalam bentuk tulisan yang lebih lengkap dan komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Arsip**

*Sin Po*, "Toean Tjoe Bou San Meninggal", tanggal 3 November 1925.

*Sin Po Wekelijksche Editie*, "Almarhoem Tjoe Bou San", tanggal 26 Desember 1925.

*Djawa Tengah Review*, September 1935.

### **Buku**

Berg, H.J. van den., (1954). *Asia dan Dunia Sedjak 1500: Sedjarah Umum dalam Bentuk Monograph*. Jakarta: J.B. Wolters.

Gardner, D. K., (2007). *The Four Books: The Basic Teachings of the Later Confucian Tradition*. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company.

- Goan, A. J., (2009). *Memoar Ang Jan Goan, 1894–1984: Tokoh Pers yang Peduli Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Nabil Hasta Mitra.
- Goddard, D., (1939). *Laotzu's Tao and Wu Wei*. Vermont: Library of Alexandria.
- Kahin, G. Mc T., (2018). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Lan, N. J., (1940). *Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwee Koan–Batavia (1900–1939)*. Batavia: Tiong Hoa Hwee Koan.
- Lan, N. J. (1962). *Sastra Indonesia-Tionghoa*. Jakarta: Gunung Agung.
- Lee, K. C., (2013). *Golden Dragon and Purple Phoenix: The Chinese and Their Multi-Ethnic Descendants in Southeast Asia*. London: World Scientific .
- Lee, L. T., (1987). *The 1911 Revolution–The Chinese in British and Dutch Southeast Asia*. Singapura: Heinemann Asia.
- Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu)., (1970). *Su-Si (Kitab yang Empat)*. Surakarta: Elizabeth Matakin.
- Salmon, C., (1981). *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annotated Bibliography*. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
- San, T. B. (1921). *Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda dan Mr. P.H. Fromberg Sr*. Batavia: Drukkerij Sin Po.
- Setiono, B. Gt., (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik (Mengungkap Fakta Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Shiraishi, T., (2005). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafi i.
- Setyautama, S., (2008). *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suryadinata, L., (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Yogyakarta: Grafi pers.
- \_\_\_\_\_, (1986). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa: 1917–1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_, (1988). *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- \_\_\_\_\_, (1990). *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_, (1996). *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- \_\_\_\_\_, (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900–2002*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_, (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai, 1965–2008*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- \_\_\_\_\_. (2010). *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary, Volume I and II*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, Chinese Heritage Center.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: Glossary and Index Volume 2*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, Chinese Heritage Center.
- Wibowo, I.; Lan, T. J., (2010). *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

### Jurnal

- Abdullah, N., (Juni 2002). “Yin dan Yang dalam Sistem Ketuhanan Konghucu”. *Religi*. 1 (1), hlm. 73–86.
- Dahana, A., (April 2000). “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”. *Wacana*. 2 (1), hlm. 54–72.
- Hanggara, A., (Desember 2016). “Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia”. *Equilibrium*. 14 (1), hlm. 56–71.
- Hapsari, R. D., (November 2016). “Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia”. *Politica*. 7 (2), hlm. 255–270.
- Kurniawan, H., (November 2014). “Peran Etnis Tionghoa pada Masa Pergerakan Nasional: Kajian Pengembangan Materi Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas”. *Penelitian*. 18 (1), hlm. 19–28.
- Pitoyo, J., (Desember 2006). “Manusia Bijaksana Menurut Taoisme”. *Filsafat*. 16 (3), hlm. 250–276.
- Rohmadi, N.; Wartyo, (Juni 2019). “Volksraad (People Council): Radicale Concentratie Political Arena and National Fraction, 1918–1942”. *Humaniora*. 31 (2), hlm. 166–176.
- Rohmah, F., (Oktober 2014). “Kritik Kwee Kek Beng Terhadap Pendidikan Anak-Anak Tionghoa di Hindia Belanda”. *Avatara*. 2 (3), hlm. 393–405.
- Widuseno, I., (Desember 2011). “Etika Natural Taoisme dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia”. *Humanika*. 14 (1), hlm 1–13.
- Xuanyi, L., (Agustus 2019). “Terjemahan Beranotasi Buku Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien (2010) Karya Leo Suryadinata dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Tionghoa”. *Paradigma*. 9 (2), hlm. 190–211.